

MENJEMBATANI BUKAN MENGHALANGI

Oleh : Chryshnanda DL



Kapolda Maluku sedang mengadakan pendekatan dengan salah seorang tokoh masyarakat.

Polisilagi....

Polisi lagi.....

Lagi-lagi Polisi.....

Mana Polisinya.....?

Apa kerja Polisi... ?

Ungkapan-ungkapan di atas sering kita dengar di kalangan masyarakat, terutama mereka yang kecewa atas kinerja polisi, keinginannya tidak terpenuhi atau terhalangi. Seolah polisi membangun tembok yang menghalangi, yang membatasi bahkan dianggap membuat jurang pemisah. Peristiwa UMI Makasar, Kendari, UNAS Jakarta, Bentrokan Hari Kesaktian Pancasila di Monas dan masih banyak peristiwa lainnya menuding yang berdampak beralihnya bola panas (isu) kepada polisi. Berbagai masalah yang menimbulkan citra buruk polisi, akar masalahnya bukan dengan polisi, tetapi imbas dan dampak yang menjadi isu pokok berbalik menjadi isu konflik dengan polisi. Dalam berbagai peristiwa-peristiwa besar polisi berhasil mengangkat citra positif, seperti pengungkapan terorisme di Indonesia, penyelesaian konflik di berbagai daerah, pengungkapan illegal logging, illegal mining dan berbagai peristiwa lainnya. Prestasi yang dicapai polisi merupakan perkara-perkara puncak yang dapat dikatakan sebagai

celebrity case, namun yang sehari-hari terjadi dalam kehidupan masyarakat atau daily case yang merupakan bagian penting sering terabaikan. Daily case inilah sebagai tiang penyangga yang kokoh dari celebrity case tadi.

Tidak dapat dipungkiri, berbagai isu yang aktual menunjukkan oknum-oknum polisi masih ada dan melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan masyarakat tidak percaya seperti: salah tangkap, arogan, pungli, terima suap, memeras, bentrok fisik antar aparat, terlibat berbagai tindak pidana, tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan masih banyak lagi. Dampak dari Tindakan para oknum tersebut social costnya sangat tinggi. Tanpa disadari, membuat jurang pemisah atau tembok penghalang antara polisi dengan masyarakat yang menyebabkan berbagai tindakan dan upaya polisi dalam mereformasi dirinya menuju polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum dalam masyarakat yang demokratis tidak terlihat dan tidak terdengar, ibarat panas setahun dihapus hujan sehari.

Pencitraan merupakan bagian penting bagi institusi kepolisian (Polri), melalui pencitraan kepercayaan dan legitimasi masyarakat kepada Polisi akan tumbuh dan berkembang. Legitimasi polisi di mata masyarakat adalah legitimasi moral, bukan kekuasaan, penguasaan atau kewenangan, pangkat, jabatan dan tentu bukan kekayaan. Pencitraan merupakan tugas dan

tanggung jawab seluruh anggota Polisi untuk menunjukkan sikap dan perilaku baik sebagai pribadi maupun sebagai petugas dapat menunjukkan profesionalismenya dan moralitasnya.

Apa peran dan fungsi polisi dalam masyarakat? Polisi adalah institusi pemerintah yang dibangun untuk menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam masalah keamanan. Untuk itu, polisi dalam menyelenggarakan tugasnya diberi kewenangan perijinan, kontrol, upaya paksa untuk menegakan hukum. Ranah kerja polisi adalah untuk kemanusiaan, melindungi dan mengangkat harkat dan martabat manusia yaitu terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial dalam masyarakat (keamanan, ketertiban masyarakat). Dalam masyarakat yang modern dan demokratis untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dibutuhkan adanya produktifitas. Dalam prosesnya banyak gangguan yang menghambat bahkan menghancurkan produktifitas, maka untuk melindungi harkat dan martabat manusia yang produktif diperlukan aturan, norma, hukum. Untuk menegakan dan mengajak masyarakat mentaatinya diperlukan suatu institusi salah satunya polisi.

Penyelenggaraan tugas polisi untuk kemanusiaan, mendukung produktifitas masyarakat dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Ini berarti polisi tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif dan tentu melakukan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang menghambat atau anti produktifitas. Model penyelenggaraan tugas polisi (pemolisian) secara garis besar dapat dibedakan antara pemolisian yang konvensional dengan pemolisian yang sedang trend dalam negara-negara maju atau dalam masyarakat yang modern dan demokratis. Model konvensional cenderung reaktif, lebih mengedepankan pada crime fighter dan law enforcement, sedangkan yang kekinian (contemporer) dikenal sebagai community policing yang lebih menyeimbangkan antara model konvensional dengan tindakan proaktif problem solving, membangun kemitraan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) dengan lebih menekankan pada upaya-upaya pencegahan dan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Community policing dalam penyelenggaraan tugas Polri dikenal dengan Polmas.

Implementasi Polmas adalah pada lingkup kecil atau komunitas, yang mengedepankan komunikasi dari hati-ke hati dan saling mengenal sebagai mitra antara polisi dengan warga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan polisi berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya kriminalitas, bahkan diharapkan dapat menjadi simbol persahabatan yang aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Implementasi Polmas dalam penyelenggaraan Polri tidaklah semudah dan secepat membalik tangan, butuh waktu dan proses panjang dan perlu didasari sebagai gerakan moral.

Penanganan berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks menuntut kualitas kinerja polisi yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum. Polisi bekerja untuk melindungi, mengayomi dan melayani kepentingan negara, masyarakat maupun pribadi yang kesemuanya adalah berdasar pada produktifitas. Tentu secara fair dan tidak diskriminatif dan mengacu soko guru demokrasi (supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparansi, akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat).

Apakah polisi boleh menggunakan upaya paksa? Apakah upaya paksa tidak melanggar HAM? Menegakan hukum merupakan tindakan upaya paksa (coercive) baik menghentikan, memeriksa, mengeledah, menangkap, memeriksa, menahan dan tindakan lainnya yang dilakukan polisi terhadap orang yang disangka melakukan pelanggaran (penyimpangan sosial) atau tersangka untuk perlindungan terhadap warga masyarakat lainnya yang menjadi korban, terganggu atau terancam karena tindakan tersangka. Di samping itu juga untuk mencegah agar jangan terjadi korban yang

lebih besar atau masalah yang meluas. Melalui penegakan hukum juga untuk menunjukkan adanya kepastian hukum, bahwa penanganan atau penyelesaian dari berbagai penyimpangan sosial atau tindak kejahatan tidak diselesaikan dengan cara-cara fisik atau anarkis tetapi dengan cara-cara yang beradab. Yang tak kalah pentingnya, penegakan hukum adalah tindakan untuk memberikan edukasi baik kepada tersangka maupun kepada warga masyarakat lainnya.

Upaya paksa merupakan tindakan melanggar HAM yang mendapatkan legitimasi baik dari pemerintah melalui undang-undang maupun dari masyarakat karena adanya kepentingan di atas dan konteksnya adalah untuk kemanusiaan yang berkaitan dengan produktifitas. Oleh sebab itu upaya paksa tidak boleh dilakukan oleh orang atau kelompok yang tidak mendapatkan legitimasi. Tindakan upaya paksa yang tanpa mendapatkan legitimasi akan menimbulkan masalah baru dan akan timbul tindakan sewenang-wenang atau sebagai tindakan premanisme. Tentu saja merupakan benalu yang tidak mendukung produktifitas tetapi justru akan menghambat bahkan dapat mematikan. Orang atau kelompok yang melakukan tindakan premanisme akan mencari keuntungan pribadi maupun kelompok baik yang berujung pada penyuiapan (bribery) atau pemerasan (ekstorsion).

Penegakan hukum atau upaya paksa yang dilakukan oleh petugas polisi mengacu pada pilar demokrasi bahwa hukum adalah panglima tindakan polisi berdasarkan atau mempedomani hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang dilakukan untuk kemanusiaan dalam konteks produktifitas. Tindakan - tindakan polisi tidak boleh kontra produktif serta sebagai upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Memberikan jaminan dan perlindungan HAM menunjukkan bahwa tindakan polisi adalah untuk kemanusiaan dan untuk mendukung produktifitas, tindakan upaya paksa polisi dilakukan terhadap segala sesuatu yang kontra produktif. Polisi juga dituntut untuk transparan dan memberikan akuntabilitas kepada publik atas tindakan upaya paksa. Ini berarti sebagai

aparatur pelayanan publik polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas sehingga terwujud dan terpelihara keamanan dan rasa aman warga masyarakat sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang menghasilkan produk-produk yang dapat mensejahterakan. Dalam hal ini dapat pula ditunjukkan bahwa keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional yaitu diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial dan mendapatkan dukungan serta legitimasi.

Profesor Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa polisi bekerja dengan O2H yaitu otak, otot dan hati nurani. Polisi menyadari bahwa keberadaannya dibutuhkan dan dibiayai oleh masyarakat, maka polisi harus membayar hutang kepada masyarakat. Tanpa masyarakat polisi tidak dapat berbuat banyak dan tidak akan berhasil menyelesaikan tugasnya karena keterbatasan sumber daya. Untuk itulah polisi merubah gaya pemolisianya untuk membangun kemitraan, mencari akar masalah dan menemukan solusinya. Pencegahan diutamakan karena mencegah lebih baik dari pada mengobati. Tindakan-tindakan proaktif sebagai penyeimbang dari berbagai tindakan kepolisian lainnya. Upaya paksa yang dilakukan polisi tanpa menggunakan hati nurani akan menjadi tindakan premanisme yang sewenang-wenang dan tidak berani melakukan tindakan tegas, ini menunjukkan polisi tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan dan lebih buruk lagi polisi tidak dapat bertindak fair karena telah hutang budi atau diatur kelompok tertentu sehingga tidak mandiri. Mungkin juga berarti ketakutan karena tidak mendapatkan legitimasi maupun kepercayaan dari masyarakat.

Menjembatani bukan menghalangi. Menjembatani berarti membangun jembatan yang menghubungkan, berupaya untuk memahami, membangun penghubung untuk dapat saling berkomunikasi, saling mengenal. Tentu bukan membangun tembok yang memisahkan atau yang menghalangi yang juga membuat batas atau pemisah yang membedakan satu dengan lainnya. Polisi



Capolda Bengkulu berkomunikasi/menjalin hubungan dengan masyarakat.

menjembatani dapat dikatakan bahwa tugas polisi dalam masyarakat yang demokratis adalah sebagai pihak ketiga yang netral, fair dan menjadi penengah yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Membangun jembatan berarti mempunyai kemampuan, kemauan, kesadaran dan tentu tanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral, karena pada jembatan inilah banyak orang bergantung untuk melewati atau mencapai tujuan. Dengan jembatan perbedaan dapat ditemukan garis merah yang menyatukan, berbagai konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara yang beradab, harkat dan martabat manusia beradab dapat terangkat dan menunjukkan adanya supremasi hukum, jaminan dan perlindungan HAM, transparansi bahkan akuntabilitas kepada publik.

Untuk membangun jembatan tidak mungkin dilakukan sendiri dan tentu memerlukan cara berfikir yang rasional, kesadaran dan kemauan, kemampuan serta waktu untuk berproses. Tanpa mencintai pekerjaannya, tanpa menyadari dan bekerja dengan tulus jembatan yang dibangun akan sia-sia, bahkan orang takut menggunakannya. Mungkin juga, ada yang menganggap jebakan bukan jembatan. Percayakah kita kepada orang yang tidak ahli untuk membangun jembatan? Beranikah kita melewati jembatan yang asal-asalan dan meragukan kualitasnya untuk menyeberang? Menjembatani perlu kepercayaan, legitimasi bahkan pengakuan. Dalam konteks ini tidak sebatas profesional tetapi juga moralitas.

Perubahan paradigma Polri sebagai polisi yang berwatak sipil sebagai polisi yang humanis, profesional, cerdas, bermoral dalam masyarakat yang demokratis bukan sekedar slogan, namun harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus yang berkesinambungan untuk merubah cara pandang, pola pikir atau nilai-nilai yang menjadi dasar kebudayaan organisasi (to change the mind set of police officers).

Polisi yang ideal adalah polisi yang cocok dengan masyarakat yang dilayaninya. Kebutuhan rasa aman dan keamanan dalam masyarakat tidak dapat disamaratakan. Antara satu daerah dengan daerah lainnya sangat berbeda dan bervariasi. Pemahaman terhadap corak masyarakat dan kebudayaannya, kearifan lokal (local genius) serta lingkungannya merupakan dasar petugas polisi menyelenggarakan tugasnya.

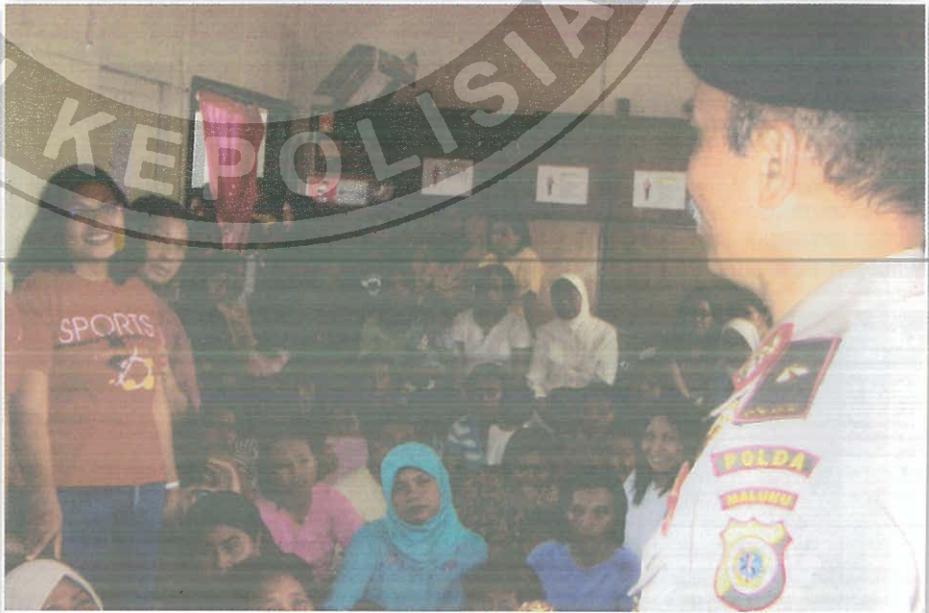
Tindakan polisi yang dapat memicu timbulnya konflik baru atau sebagai detonator ledak yang dapat berdampak luas akibat ketidak profesionalannya, kelalaiannya atau ketidakpercayaan masyarakat untuk masa yang akan datang tidak boleh lagi terjadi dapat menurunkan bahkan merusak citra dan

legitimasi polisi. Tugas polisi memang ambivalen di satu sisi melindungi dan mengayomi serta melayani namun di sisi lain polisi juga melakukan tindakan upaya paksa. Apabila polisi mendapatkan legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat maka tindakan polisi baik preemtif, preventif bahkan represif sekalipun akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Dan sebaliknya social cost yang sangat mahal harus dibayar oleh polisi manakala masyarakat tidak lagi percaya kepada polisi.

Polisi juga manusia, bukan manusia super yang serba bisa, serba bisa, bagai Bandung Bondowoso atau Sangkuriang dalam waktu semalam semua program dapat diselesaikan. Membangun Polri sebagai polisi yang berwatak sipil, profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum memerlukan proses panjang dan kesadaran, kerelaan dan keberanian berkorban sangat dibutuhkan. Di jaman transisi sekarang ini polisi tidak hanya dituntut profesional tetapi juga bermoral. Moralitas petugas polisi dapat ditunjukkan dari tindakan-tindakan yang mencintai dan bangga akan pekerjaan serta mengerjakannya dengan tulus serta bereaksi cepat dalam merespon laporan atau aduan masyarakat. Para petugas polisi harus sadar dan bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada rakyat yang telah membiayainya. Keberadaan polisi dapat menjadi simbol persahabatan yang berarti aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Polisi tidak bermain-main dan harus tidak mentolerir segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang kontra produktif.

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat manakala terwujud dan terpeliharanya keteraturan sosial (keamanan, rasa aman, keselamatan, ketertiban) dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitas yang menghasilkan produk-produk yang dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Tentu tidak lagi merasa ketakutan atau dihantui preman, pemerasan dan birokrasi yang membelitnya. Di sini peran dan fungsi polisi sangat penting untuk membangun kesadaran, kemitraan kerja sama, sistem yang terpadu dan mencari akar masalah serta menemukan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak. Inilah jembatan yang harus dibangun dengan profesional, tanggungjawab hukum maupun moral yang tidak dibangun sendiri tetapi bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya sebagai satu kesatuan yang holistik dan merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Keberhasilan tugas polisi bukan semata-mata menangkap penjahat, mengungkap suatu perkara tindak pidana tetapi manakala tindak pidana tidak terjadi dan terwujud serta terpeliharanya keteraturan sosial dalam masyarakat. Semua itu ada dan bisa karena dimengerti (esse est percipi)

Selamat Hari Bahayangkara yang ke 62 semoga Polri Semakin Jaya dan dipercaya masyarakat sebagai Polisi yang berwatak sipil yang profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum dalam masyarakat yang semakin modern dan demokratis.***



Polri perlu mengadakan dialog dengan masyarakat guna mewujudkan kepercayaan kepada Polri.

PROFIL KELEMBAGAAN BPKP REPUBLIK INDONESIA

Visi Auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentrans-formasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi

1. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN.
2. Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah melalui pengkomunikasikan hasil pengawasan.
3. Mengembangkan governance system dan sinergi antar APIP dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan intern pemerintah guna memberi dukungan bagi proses pengambilan kebijakan oleh Presiden.

Tugas & Fungsi

Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :

- Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

3. Penetapan system informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya;
 - b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;



Gedung Kantor BPKP Republik Indonesia

- c. Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain;
- d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan BPKP dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

1. Audit
2. Konsultasi, asisten dan evaluasi
3. Pemberantasan KKN, dan
4. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Audit

Kegiatan audit mencakup:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/D Badan Usaha Lainnya
3. Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

4. Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
5. Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Dana off Balance Sheet BUMN maupun Yayasan yang terkait
7. Dana Off Balance Budget pada Departemen/ LPND
8. Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Temuan-Temuan Pemeriksaan
9. Pemeriksaan Khusus (Audit Investigasi) untuk mengungkapkan adanya indikasi praktik Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan penyimpangan lain sepanjang hal itu membutuhkan keahlian di bidangnya
10. Pemeriksaan lainnya yang menurut pemerintah bersifat perlu dan urgen untuk segera dilakukan.

Konsultasi, asistensi dan evaluasi

Di bidang konsultasi, asistensi dan evaluasi, BPKP berperan sebagai konsultasi bagi para stakeholders menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mencakup: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pemberantasan Korupsi

Dibidang perbantuan pemberantasan korupsi, BPKP membantu pemerintah memerangi praktik korupsi kolusi dan nepotisme, dengan membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik.

Dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan KKN, BPKP telah mengikat kerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. BPKP juga mengikat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. BPKP tergabung dalam Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) bersama-sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian (yang telah selesai masa tugasnya). Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Dibidang pendidikan dan pelatihan pengawasan, BPKP menjadi instansi Pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah. Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai Pejabat Fungsional Auditor. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP berperan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah.***

MENJAGA DAN MENGAWASI KERAWANAN DAERAH PERBATASAN

Ibarat rumah, perbatasan adalah pagar yang harus dirawat dan diperkuat, agar tidak ada orang yang masuk atau menguasainya. Seluruh instansi yang terkait dengan daerah perbatasan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, TNI dan Polri harus dapat menjaga dan mengawasi serta mempertahankannya dari gangguan dan ancaman Negara lain.

Wilayah perbatasan Indonesia baik perbatasan darat maupun perairan memang cukup panjang seperti perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, perbatasan dengan Papua Nugini di Papua, perbatasan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, sedangkan perbatasan di perairan meliputi perbatasan dengan Singapura, Malaysia di Selat Malaka dan laut Natuna, perbatasan dengan Filipina di laut Sulawesi, perbatasan dengan Australia dan Timor Leste di laut Timor dan laut Arafuru.



Perbatasan Indonesia - Timor Leste

Selain perbatasan di daratan dan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia harus mencari alur internasional yang dapat dilalui oleh kapal-kapal Negara lain yang akan menuju suatu Negara tetapi harus melalui geografis Republik Indonesia adapun alur internasional yang ada adalah Selat Malaka, dan perairan Riau, Selat Sunda, Laut Sulawesi, Selat Sumbawa, Laut Arafuru, Laut Karimata melalui Nunukan dan Tawao

Upaya pengamanan dan pengawasan perbatasan daerah dan alur internasional merupakan hal yang harus dilaksanakan secara konsisten dan terus-menerus agar tidak dimanfaatkan oleh Negara lain, yang akan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian NKRI, karena Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dan memiliki sumber daya alam yang kaya dan dibutuhkan oleh negara lain, serta berbagai kepentingan berbagai Negara.

Pentingnya daerah perbatasan secara gamblang ditegaskan oleh konstitusional dalam kaitan implikasinya yang sangat luas terhadap kedaulatan Negara, pemerintahan, keamanan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia dalam upaya perkembangan globalisasi dunia.

Daerah sepanjang perbatasan Indonesia banyak yang tidak terurus dan terawasi, sehingga patok yang menunjukkan batas wilayah hilang dan ada yang bergeser, bergesernya patok bisa karena alam atau adanya kepentingan Negara lain.

Patok-patok perbatasan Indonesia dan Malaysia yang membentang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur sepanjang 2.004 Km ditandai dengan 19.328 patok, perbatasan yang rawan dan sering terjadi pergeseran patok terjadi di perbatasan Kalimantan dan Malaysia, sekitar 275 patok diperkirakan hilang disepanjang perbatasan, hal ini perlu dilakukan lenterisasi dan perbaikan.



Perbatasan Indonesia - Papua Nugini

Sementara ini lebih dari 1.301 Ha tanah di wilayah perbatasan NTT dan Timor Leste, saat ini diklaim oleh Timor Leste, padahal tanah itu secara resmi masih dalam proses penetapan kedua Negara 8 April 2005, yang disepakati 907 titik koordinasi untuk di pasang patok perbatasan.

Eksistensi patok batas yang tergelar secara kuantitas di wilayah perbatasan sangat diperlukan dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah, pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat yang hidup di perbatasan Negara, baik dari segi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya sehingga pemerintah pusat dan daerah harus dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat menjangkau pedalaman dan akan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat perbatasan agar tidak terpengaruh oleh kehidupan masyarakat yang ada diseborang perbatasan khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan

Upaya nyata yang segera perlu diwajibkan oleh pemerintah adalah memprioritaskan adanya pelayanan berupa kesempatan mengikuti pendidikan, pelayanan kesehatan yang murah dan tersedianya lapangan kerja untuk mencapai kesejahteraan dan kemudahan transportasi dan komunikasi dalam upaya memenuhi kebutuhan pokoknya.**

NILAI SPIRITUAL PERISTIWA MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW MAKNAI SECARA KONSEPTUAL SERTA AMALKAN SECARA NYATA

Momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang selalu kita peringati, baik dilingkungan Mabes Polri maupun seluruh jajaran, pada dasarnya mengandung maksud agar setiap insan Polri dapat mengambil hikmah ketauladanan, sikap, sifat perilaku terpuji dari pada Rasulullah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai inspirasi serta diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari baik dalam rangka kedinasan Polri maupun diluar kedinasan, demikian antara lain amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolri pada acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2008 bertempat di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri Jakarta.

Lebih jauh Kapolri mengatakan bahwa pada setiap kali pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW kita semua diingatkan kembali kepada pribadi Rasulullah yang patut menjadi tauladan karena didalam dirinya tercermin perilaku mulia dimana apabila hal tersebut terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari akan dapat menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tantangan pelaksanaan tugas Polri kedepan akan semakin berat dan kompleks, selaku alat negara yang bertanggung jawab atas perpeliharannya ketertiban dan keamanan masyarakat tegaknya hukum serta terpenuhinya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat Polri akan selalu dihadapkan pada lingkungan yang selalu dinamis, berbagai aspek didalamnya mengandung beragam potensi rawanan. Selain itu kedepan Polri juga dihadapkan pada tantangan berupa harapan dan tuntutan masyarakat terkait denganampilan Polri yang lebih profesional, transparan, akuntabel yang sesuai dengan semangat reformasi.

Sejak kemandiriannya Polri telah mereformasi dirinya dengan melakukan pembenahan pada aspek-aspek kunci



Wakapolri Komjen Pol. Drs. Makbul Padmanegara memberikan sambutan

organisasi yaitu aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kultural merupakan hal yang paling krusial dan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk membenahinya, karena didalam aspek kultural tersebut terjabarkan budaya kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan semangat reformasi, Polri dituntut untuk mampu menampilkan performanya selaku Polisi Sipil, yang mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, bermoral dan modern. Dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan kelola pemerintahan yang baik atau good government dan pemerintahan yang bersih atau clean government serta menjunjung tinggi nilai-nilai

Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang universal guna menguatkan pilar-pilar pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang demokratis.

Menyadari uraian tersebut, Kapolri mengajak hadirin patut bersyukur kepada Allah SWT, bahwa saat ini Polri telah, sedang dan akan terus menuju kearah yang lebih baik.

Dengan paradigma saat ini jajaran Polri berusaha keras menampilkan performanya, agar sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Pelayanan Polri yang diberikan kepada masyarakat semakin inovatif, serta diapresiasi masyarakat luas. Selain itu jajaran Polri juga patut berbangga hati serta bersyukur bahwa prestasi Polri dibidang penegakan hukum, memperoleh acungan jempol dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun tingkat internasional seperti halnya pengungkapan jaringan terorisme, peredaran Narkoba, kejahatan illegal logging dan tentunya permintaan untuk menjaga perdamaian dinegara lain yaitu di Sudan. Disamping itu berkat kerja keras kita semua kondisi Kamtibmas diseluruh wilayah Indonesia secara umum dapat terpelihara dengan baik dan kondusif walaupun dibeberapa tempat kita

ketahui ada riak-riak berupa gejala sosial terkait dinamika kehidupan masyarakat setempat namun demikian tidak sampai menimbulkan instabilitas situasi dan kondisi.

Dari berbagai pencapaian dan keberhasilan tersebut bukan berarti kita berpuas diri dan terlena sehingga akan lupa terus berbenah diri. Kita bersama mengetahui bahwa masih ada oknum-oknum anggota Polri yang melakukan perbuatan yang melanggar berbagai aturan baik peraturan disiplin anggota, Kode Etik Profesi Kepolisian, bahkan peraturan pidana tentunya. Ulah segelintir oknum seperti ini dapat menodai citra Polri ditengah masyarakat, sehingga untuk itu saya mengharapkan agar sebagai insan Rastra Sewakottama, Abdi Utama Negara yang patut menjadi teladan Masyarakat marilah kita saling mengingatkan untuk selalu dapat menjaga sikap dan perilaku baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan, sehingga perbuatan-perbuatan tercela tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW kali ini Kapolri

mengharapkan momen ini tidak sekedar menjadi rutinitas yang berulang setiap tahunnya dan dicukupkan pada kegiatan-kegiatan seremonial semata. Umat muslim berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Al Qur'an, menyimak kembali kisah-kisah Rasulullah dari mulai kelahirannya, perjuangannya, mukjijatnya dan akhlaknya yang mulia kemudian sampai disini peringatan selesai. Lebih dari itu saya mengharapkan kepada seluruh anggota Polri dapat mengambil hikmah dan ketauladanan Rasulullah sebagai esensi yang paling penting peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Dengan mengkaji nilai spiritual peristiwa Maulid tersebut untuk selanjutnya dimaknai secara konseptual serta diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Hadah ayat 21 yang artinya "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah SWT". Terkait dengan hal tersebut tema yang diangkat dalam peringatan kali ini yaitu dengan "Meneladani kepribadian

Rasulullah kita tingkatkan kinerja yang semakin profesional, bermoral dan modern" adalah sangat tepat dan relevan.

Tema ini mengandung maksud agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dapat dimaknai secara konseptual, supaya hikmah keteladanan Rasulullah dapat lebih meningkatkan kualitas diri pribadi anggota Polri sehingga mampu menampilkan perilaku yang baik didalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Selanjutnya dengan adanya peningkatan kualitas dari anggota diharapkan tampilan kinerja Polri sesuai dengan visinya yaitu Polri yang profesional, bermoral dan modern akan dapat segera terwujud.*** (nats)

Amanat Kapolri pada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2008 di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri Jakarta



Wakapolri Komjen Pol. Drs. Makbul Padmanegara sedang memberikan santunan